

KENDALA DAN RINTANGAN MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

EDWIN YULISKA

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
edwinyuliska@gmail.com

Abstract: *The realization of a person's socio-economic life is inseparable from the human effort itself with all available resources and efforts and is influenced by several driving factors, including the urge to defend oneself in life from various influences. The creation of expanded job opportunities for the wider community is a reflection of Article 33 of the 1945 Constitution, where the prosperity of the people is prioritized, not the prosperity of individuals. Utilizing natural resources for the greatest prosperity of the people by taking into account the preservation of functions and balance of the environment, sustainable development, economic and cultural interests of the surrounding community and environmental spatial planning that supports each other. Therefore, sensitivity and serious concern are required for the phenomena of life which are increasingly worrying about the social turmoil of the nation and state, therefore all parties should also spark a movement for change in opening up broad employment opportunities, one of which is to provide space for facilities and infrastructure. to develop creativity and entrepreneurial potential.*

Keywords: *Constraints, Barriers, Government, Clean, Authoritative.*

Abstrak: Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh. Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Maka dari itu sangat dituntut kepekaan dan kepedulian yang serius terhadap fenomena kehidupan yang semakin hari semakin mencemaskan terhadap gejolak sosial berbangsa dan bernegara, oleh karenanya seharusnya pula semua pihak mencetuskan gerakan perubahan di dalam membuka lapangan pekerjaan yang luas, salah satu adalah memberi ruang sarana dan prasarana untuk mengembangkan kreatifitas dan potensi kewirausahaan.

Kata Kunci: Kendala, Rintangan, Pemerintah, Bersih, Berwibawa.

A. Pendahuluan

Pemerintahan yang bersih, di mana seluruh undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang pemegang pusat pemerintahan dan atau orang-orang yang mewakili rakyatnya berdasarkan kepada kepentingan bersama (kepentingan Negara) dengan pola pemikiran yang objektif demi kemajuan, kesejahteraan dan kemuliaan bangsanya. Di samping itu penyelenggaraan dari semua program kerja serta pemberlakuan dari semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran berbangsa dan dengan pengawasan disiplin yang cermat.

Pemerintahan yang berwibawa merupakan pemerintahan yang personal, penyelenggara pemerintahan tersebut dari tampuk pimpinan sampai kepada unsur pelaksana terendah, terdiri dari orang-orang yang dipercaya dan dipatuhi baik oleh bawahan maupun oleh anggota masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintahan tidak akan berhasil membangun Negara dan rakyatnya, bila tidak diawali membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kenyataannya ada dua bentuk yang terjadi dalam membangun pemerintahan, yaitu pertama, pemerintahan dengan pola

pemikiran yang semua keputusan kebijakan publik diambilkan dari atas atau dari pusat pemerintahan, ini disebut juga pemerintahan dengan sistem sentralisasi. Bentuk kedua, pemerintahan dengan pola pemikiran yang diantara banyak keputusan kebijakan publik diambil dari bawah atau dari yang mewakili rakyat, pola pemerintahan yang seperti ini menggambarkan kehidupan demokrasi, dan pola ini lebih dikenal dengan sistem desentralisasi.

Kedua pola atau bentuk pemerintahan ini, sama-sama baiknya sepanjang rakyat dan atau orang-orang yang menyelenggarakan pemerintahan di samping memiliki kemampuan juga memiliki sikap mental terkendali terpuji. Namun adakalanya terdapat beberapa kendala dan rintangan dalam membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga tidak berjalan sesuai dengan cita-cita Pancasila yang telah dicetuskan oleh tokoh-tokoh negara dahulu.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Arti dan Tujuan Pemerintah yang Bersih Dan Berwibawa

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, masyarakat dihadapkan pada suatu kondisi dimana pemerintahan yang bersih akan dapat menumbuhkan wibawa dan pemerintahan yang berwibawa akan lebih mudah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bila pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah terwujud, maka akan muncul:

- a. Rasa persatuan dan kesatuan akan menjadi bertambah kuat;
- b. Rasa sebangsa dan setanah air akan semakin mendalam;
- c. Berbagai pekerjaan pembangunan akan berjalan lancar dengan hasil sebagai mana mestinya;
- d. Upaya meningkatkan kecerdasan dan pendidikan warga akan tercapai dengan mudah;
- e. Tingkat kehidupan warga bangsa akan berada dalam berkecukupan, di samping dapat menikmati kehidupan sendiri sesuai dengan cita-cita;
- f. Fakir miskin dan tingkat kejahatan relatif menjadi rendah; dan
- g. Warga bangsa dari Negara yang bersangkutan akan menjadi warga terpancang dari kaca mata dunia Internasional, dan setiap warga bangsa bangga akan bangsanya.

Sikap mental bangsa juga sangat memegang peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, antara lain:

- a. Setiap warga bangsa harus mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih dan cita-cita yang luhur, terutama bagi penyelenggara pemerintahan, orang-orang yang menjadi wakil rakyat dan para penegak hukum.
- b. Setiap warga bangsa harus memiliki keyakinan bahwa dengan selalu memelihara kesehatan, serta memiliki kemauan berfikir dan kemauan bekerja keras di samping selalu memanfaatkan waktu yang berjalan, maka apa yang menjadi cita-citanya akan tercapai.
- c. Setiap warga bangsa harus mampu membuang jauh-jauh perbuatan-perbuatan terlarang, dan harus selalu berusaha untuk mengerjakan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat dan bangsanya.
- d. Setiap warga bangsa harus memiliki sikap pantang menyerah dan bila berhasil (sukses) tidak mudah merasa puas dan tidak suka membanggakan diri.
- e. Setiap warga bangsa harus mampu menjaga etika berdemokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tahap dalam Membangun Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa

Membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, membutuhkan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan yaitu :

- a. Tahap pembangunan Sikap mental. Membangun sikap mental bangsa dapat dimulai antara lain melalui: 1) Pembentukan sikap mental diri pada anak-anak melalui keluarga

dan masyarakat, setiap pemimpin keluarga dan warga dewasa harus mensosialisasikan dengan seksama kepada anak-anak tentang perbuatan terpuji dan perbuatan terlarang serta sekaligus ditanamkan kepada anak-anak agar mereka menjauhi diri dari perbuatan terlarang, sebaliknya harus selalu berusaha untuk melakukan perbuatan terpuji. Antara lain, membiasakan diri menggunakan waktunya untuk belajar dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi anggota keluarga dan bagi masyarakat serta bangsanya; dan 2) Pemberian contoh teladan dari masing-masing orang tua, lingkungan masyarakat dan penyelenggara Negara, yaitu suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh para orang tua, lingkungan masyarakat atau penyelenggara pemerintahan untuk diikuti dan dirasakan warga keseluruhan.

- b. Tahap pembangunan kecerdasan dan kemampuan. Membangun kecerdasan dan kemampuan (produktivitas) bangsa dapat dimulai dari peningkatan kuantitas dan kualitas baik pendidikan formal, mulai dari TK, SD SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, maupun pendidikan informal. Untuk mewujudkan semua tingkatan pendidikan tersebut di samping dapat dilakukan oleh pemerintah juga dapat dilakukan masyarakat, baik yang diselenggarakan dalam bentuk badan hukum yayasan, maupun dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau berbentuk badan hukum lainnya. sehingga dengan demikian dapat tercipta persaingan guna mencapai kualitas yang diinginkan. Di samping itu pemerintah sebagai regulatornya perlu mengatur kualitas tersebut dalam bentuk mengadakan undang-undang atau peraturan-peraturan demi terwujudnya persaingan yang sehat yang mengacu kepada peningkatan kualitas tersebut.
- c. Tahap pembangunan ekonomi rakyat. Membangun ekonomi rakyat maksudnya adalah memberdayakan rakyat yang berada di tingkat paling bawah yang jumlahnya cukup besar dan sebagian besar mereka berdomisili di pedesaan. Pada umumnya, pekerjaan utama mereka bertani, bercocok tanam, beternak, nelayan dan lain-lain. Untuk menumbuhkan semangat kerja dari masyarakat di pedesaan tersebut, pemerintah perlu memikirkan dan berusaha menciptakan penurunan dari setiap harga pokok atau biaya produksi dari hasil produksi mereka, dengan memberikan bantuan pengadaan air untuk sawah (irigasi), pupuk, bibit, peralatan produksi, bantuan penyuluhan dan lain-lain. sehingga harga pokok dari setiap hasil produksi mereka dapat ditekan serendah mungkin. Sebaliknya, pihak pemerintah perlu mengupayakan harga penjualan (harga pasar) dari setiap hasil produksi di dalam negeri tersebut untuk dapat ditingkatkan. Antara lain, dengan jalan menghentikan secara bertahap impor barang-barang sejenis, seperti beras, gula, daging, ikan, sayur-mayur dan barang-barang kebutuhan lainnya yang dapat di produksi di dalam negeri. Di samping itu bangsa ini harus dididik untuk membiasakan diri memakai barang-barang hasil produksi bangsa sendiri, meskipun produksi luar negeri lebih baik dan lebih murah, sampai akhirnya produksi petani atau warga desa tersebut dapat menyaingi kualitas produksi luar negeri. Dan bila terjadi *over production* (kelebihan produksi), maka pemerintah perlu membantu pemasarannya ke luar negeri. Dengan demikian warga yang berada di tingkat bawah yang jumlahnya sangat besar akan menjadi bersemangat bekerja dan akan memperoleh pendapatan yang layak untuk dapat menjalani kehidupan minimal ditingkat sederhana, dapat makan, tempat tinggal, perawatan kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak mereka.
- d. Tahap pembangunan kepercayaan masyarakat. Tahap ini merupakan perwujudan dari pembentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut, yaitu melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, stabilator, mediator dan eksekutor serta fasilitator. sebagai regulator, yaitu pemerintah beserta aparaturnya harus membuat berbagai undang-undang atau peraturan meliputi beberapa aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara kepada kepentingan bangsa itu sendiri. Sebagai stabilator, pemerintah beserta aparaturnya harus mampu mengendalikan kehidupan berbangsa dan perkembangan ekonomi, politik serta keamanan agar tetap stabil dan dapat menjaga kepentingan semua pihak secara berimbang. Sebagai mediator, pemerintah beserta aparaturnya harus dapat menjadi penengah dari setiap konflik kepentingan yang terjadi

di tengah masyarakat secara jujur dan adil. Selanjutnya pemerinth serta aparaturnya sebagai eksekutor harus dapat memberikan sanksi atau hukum yang dapat diterima oleh raso keadilan terhadap pelanggaran dari setiap undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh aparaturnya sendiri. Bila semua hal tersebut dapat terwujud, maka dengan sendirinya kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri akan tumbuh, dan sekaligus pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut akan terbangun secara berkesinambungan.

- e. Tahap pembangunan rasa nasionalisme atau kebangsaan. Rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan adalah merupakan psikologis bangsa yang akan memberikan dorongan kejiwaan kepada tiap warga bangsa dan pelaksana pemerintahan untuk mengimplementasikan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsanya, dalam bentuk pengabdian, pengorbanan dan sumbang pikiran ataupun tenaga bagi kemajuan dan kemuliaan bangsanya. Perasaan nasionalisme dan kebangsaan tersebut akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi yang mendalam dari setiap warga yang menganutnya, dengan demikian mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dan menjauhi yang tidak benar demi kemajuan dan citra bangsa. Rasa kecintaan terhadap bangsa dan warga bangsa dapat menumbuhkan rasa pengabdian yang tinggi dari setiap warga bangsa. Kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan tersebut melahirkan jiwa patriot, kejujuran dalam kecintaan, sehingga dengan sendirinya terwujud pemerintahan yang bersih. Keberhasilan menanamkan rasa kebangsaan dan rasa nasionalisme dalam lubuk hati setiap warga bangsa, akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk membangun rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan tersebut, antara lain dengan adanya jaminan perlindungan hak-hak yang melekat pada diri setiap warga maupun hak-hak tertuang dalam undang-undang oleh pemerintah.

3. **Kendala dan Rintang Membangun Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa.**

Membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, banyak sekali kendala dan rintangan yang harus di benahi, antara lain:

- a. Faktor pengangguran dan ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena bila di dalam satu Negara banyak warganya yang tidak memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang layak (menganggur), akan menyebabkan ekonomi Negara itu lemah, akibat minimnya jumlah penerimaan Negara berupa pajak dan lain-lain. Sehingga pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membayar gaji pejabat beserta staf dan karyawannya dalam jumlah yang layak (berkecukupan). Sehingga menyebabkan pejabat beserta staf dan karyawan tersebut melakukan perbuatan berupa korupsi uang, korupsi waktu, korupsi penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya menjadi kebiasaan.
- b. Faktor pendidikan, Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena bila kecerdasan warga bangsa tidak memadai, maka bangsa itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan atau di samping tidak memiliki kemampuan kerja yang berkualitas.
- c. Faktor penegakan hukum, Faktor ini sangat penting, di samping untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap warga dalam berusaha atau menjamin jalannya peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat, juga akan memberikan kesadaran bagi pelanggarnya. Bila pemerintah tidak memprioritaskan penegakan hukum dan disiplin dalam menjalankan norma-norma hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, akan dapat menimbulkan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum tanpa ada rasa takut pada sanksi yang akan diterima, Sehingga berpengaruh terhadap pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- d. Faktor sikap bersungguh-sungguh, Setiap pekerjaan apa pun bentuk dan ukurannya, hasilnya akan dipengaruhi oleh tingkat kesungguhan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Apabila unsur pelaksana pemerintah dan warga Negara secara keseluruhan tidak memiliki dan atau tidak membiasakan diri bersikap sungguh-sungguh dalam

- melaksanakan setiap pekerjaan, maka usaha pembangunan pada akhirnya akan membawa kehancuran.
- e. Faktor pengelolaan administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pekerjaan administrasi yang cermat, teratur dan dilengkapi bukti-bukti yang lengkap sangat dibutuhkan untuk menentukan nilai pertanggungjawaban dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemerintahan. Ada 2 (dua) hal yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu: 1). Nilai dari sebuah gagasan atau program kerja yang biasanya diturunkan dari atas. 2). Kejujuran atau nilai dari penyelenggaraan gagasan atau kebijakan tersebut atau pertanggungjawabannya. Pemerintah beserta aparatnya harus membiasakan diri menyelenggarakan pekerjaan administrasi yang cermat dan teratur serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar, karena bagaimanapun bagusnya sebuah gagasan atau kebijakan atau peraturan, tetapi bila penyelenggaraannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (asal-jadi), cita-cita Negara tidak akan tercapai.
 - f. Faktor keasadaran moral, Sebagai pelayan masyarakat, pada dasarnya, penyelenggara pemerintahan itu adalah orang-orang yang diberi amanah atau kepercayaan oleh rakyat berdasarkan kemampuan, kecakupan dan sikap mental yang bersangkutan dinilai telah memenuhi persyaratan. Apabila pejabat pemerintah beserta staf dan karyawannya, tidak menyadari bahwa mereka bekerja adalah untuk membangun kesejahteraan warga bangsanya, sehingga mereka tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap warga bangsanya sendiri. Dengan kata lainnya, mereka tidak memiliki rasa kepedulian terhadap tugas dan kewajibannya sekaligus terhadap warga dan bangsanya, maka pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak akan tercapai.
 - g. Faktor efisiensi birokrasi, Pada dasarnya, fungsi pemerintah mengatur dan memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Namun birokrasi yang panjang dan yang berbelit-belit akan menimbulkan inefisiensi dan biaya ekonomi yang tinggi yang pada gilirannya dapat menjurus kepada penyimpangan terhadap perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - h. Faktor politik, Kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun dalam kerangka kehidupan politik, dan pada dasarnya negara tersebut adalah merupakan kehidupan politik. Hal tersebut tergambar bagaimana bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga penyelenggaraan kehidupan bernegara, seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat rentan dengan kondisi dan perkembangan politik dalam masyarakat atau Negara. Demikian juga dalam hal penegakan hukum. Apabila perkembangan kehidupan atau pergaulan politik dalam masyarakat tidak kondusif atau tidak memiliki etika berpolitik, dan atau tidak berorientasi kepada kepentingan bangsa dan Negara. Namun sangat sarat dengan nuansa kepentingan kelompok atau pribadi, maka upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak akan tercapai.
 - i. Faktor budaya dan filosofis masyarakat, Perilaku kehidupan suatu bangsa diwarnai oleh budaya dan filosofis yang di anut masyarakat bangsa tersebut. Apabila kecendrungan filosofis masyarakat tersebut mengedepankan kehidupan dan tujuan hidup yang berlandaskan pada materi dan akhirnya menjadi membudaya. Sebagai akibat dari orientasi materi atau kebendaan tersebut, maka terjadi pergeseran nilai-nilai idealism kepada nilai pragmatism bahkan akan lebih ekstrem menjadi nepotisme dan oportunistik. Dalam kenyataannya orang-orang ideal tersebut sering terpinggirkan oleh orang-orang yang pragmatis atau nepotisme dan oportunistik ini. Kondisi ini akan dapat mempengaruhi perilaku penyelenggara Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - j. Faktor pengawasan, Ketertinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, ialah karena bangsa Indonesia pada umumnya mengenyampingkan sikap bersungguh-sungguh dalam mematuhi undang-undang atau peraturan dan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan. Maksud bersikap sungguh-sungguh disini adalah, dalam menjauhi semua

perbuatan terlarang dan bersungguh-sungguh pula dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam hal ini factor pengawasan menjadi sangat penting, agar sikap bersungguh-sungguh tersebut terlaksana sebagai mestinya.

D. Penutup

Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh. Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Maka dari itu sangat dituntut kepekaan dan kepedulian yang serius terhadap fenomena kehidupan yang semakin hari semakin mencemaskan terhadap gejolak sosial berbangsa dan bernegara, oleh karenanya seharusnya pula semua pihak mencetuskan gerakan perubahan di dalam membuka lapangan pekerjaan yang luas, salah satu adalah memberi ruang sarana dan prasarana untuk mengembangkan kreatifitas dan potensi kewirausahaan.

Daftar Pustaka

- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Jusuf Suit Almasdi. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Syiar Media, Jakarta. 2012.
- Lemhamnas. *Pembangunan Nasional*. Balai Pustaka. Lemhamnas. Jakarta. 1997.
- Pipin Syarifin dan Jubaedah, Dedah, *Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Jakarta 2011.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.